

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN LEMBAGA KREDIT MIKRO MASYARAKAT (LKMM) DI KABUPATEN JEMBER

Oleh:
SULISTIYONO

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Persoalan yang terbesar bagi UMKM yaitu dalam menghadapi berbagai hambatan iklim usaha, baik yang bersifat internal maupun eksternal, contohnya produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana kebijakan mikro, khususnya melalui program Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM) di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model “*bottom up*” dengan menganalisa asumsi-asumsi yang bersifat filosofis maupun teoritis sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program UMKM ini merupakan kebijakan dari Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Jember. Desain program LKMM atau Bank Gakin berupaya memanfaatkan tokoh-tokoh informal di tingkat dusun sebagai pengurus LKMM dengan tujuan mengurangi biaya transaksi pengelolaan. Kepengurusan LKMM setelah mendapatkan pelatihan akan dipercayakan kepada mereka untuk mengelola dan menyalurkan dana bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta kepada penduduk miskin dengan mengembangkan kegiatan pokmas. Evaluasi program ini meliputi kegiatan pelaporan perkembangan tiap bulan serta kegiatan rutinitas LKMM termasuk laporan laba rugi, kas, aktiva untuk dilaporkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kredit Menengah dan disampaikan kepada Bupati Jember.

Kata Kunci : **Kredit mikro, LKMM, UMKM**

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (UKMM) is a business activity that is able to expand employment, providing economic services to the wider community, play a role in the process of equalization and improvement of people's income, stimulate economic growth, and play a role in realizing national stability. The biggest issue for SMEs is in the business climate facing various constraints, both internal and external, for example, production, processing, marketing, human resources, design and technology, capital. This study wanted to examine how micro policies, particularly through programs Microcredit Organization Society (LKMM) in Jember. This research uses descriptive qualitative approach with a model of "bottom up" by analyzing the assumptions of philosophical and theoretical, as a basis for formulating policies. The results of this study indicate that the SME program is a policy of the Department of Cooperatives and SMEs Jember. Design LKMM or Bank Gakin program seeks to utilize the informal leaders at the village level as a board LKMM with the aim of reducing transaction costs management. Stewardship LKMM after getting training will be entrusted to them to manage and distribute funds from the government and private parties to the poor by developing the activities of community groups. Evaluation of the program includes the development of monthly reporting as well as routine activities LKMM including income statements, cash, assets to be reported to the Department of Cooperatives and Micro Credit Medium and submitted to the Regent Jember.

Keywords : **Microcredit, LKMM, UKMM**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia mengalami banyak kemajuan dan laju pertumbuhan dalam bidang politik, pertahanan dan ekonomi sejak masa kemerdekaan. Persoalan yang masih harus mendapat perhatian dari pemerintah, salah satunya yaitu dalam bidang kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan melalui sektor ekonomi. Indonesia mengalami krisis ekonomi karena makin bertambahnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan tersedianya lapangan pekerjaan, terjadinya PHK, banyak perusahaan yang menutup bidang usahanya, ketimpangan pendapatan serta keberadaan pasar global.

Maret 2009 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 32.530 juta jiwa, atau sebesar 14,15% dari jumlah penduduk yang ada. Adapun partisipasi angkatan kerja baru mencapai 67.60% dari keseluruhan angkatan kerja yang berjumlah 113.744.408 orang atau 104.485. 444 orang. Dengan demikian terdapat 9.258.964 juta pengangguran terbuka atau 33.40 persen dari angkatan kerja¹.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi persoalan ini yaitu dengan menerapkan strategi kebijakan pembangunan melalui usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya kebijakan UMKM ini diharapkan tidak serta merta berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional

berkembang, tetapi juga sebagai wadah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif yang bersifat sederhana sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat apabila dapat dikelola dengan baik.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan yang melibatkan masyarakat Indonesia. UMKM memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor nasional dan investasi nasional. Pada tahun 2012 sektor UMKM dapat menyumbang lebih dari 56% PDB dan 10% dari eksor. Hal ini tentunya dapat menambah optimalisasi penerimaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)².

Usaha Mikro dan Kecil ini membentuk Lembaga Kredit Mikro yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat. LKM memiliki komitmen untuk melayani masyarakat yang selama ini diabaikan oleh sektor perbankan formal. Perkembangan sektor keuangan mikro didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat miskin memiliki kapasitas untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan ekonomi tetapi dibatasi oleh kurangnya akses dan penyediaan tabungan, kredit dan fasilitas asuransi.

Dengan maraknya pendirian LKM diberbagai tempat di Indonesia, maka tidak ketinggalan Pemerintah Kabupaten Jember

¹ BPS, 2009

² Kementrian Keuangan, 2012

berdasarkan UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP 32 tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil, pada tahun 2005 memulai membuat program pendirian LKM di wilayahnya. Menurut Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Jember kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember tersebut merupakan langkah yang strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Karena berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan dari total kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan formal dengan yang diberikan kepada pengusaha kecil³.

Sebagian persoalan yang masih sering menjadi tanda tanya oleh berbagai pihak, baik pemerintah dan masyarakat adalah: "apakah kebijakan program pendirian LKMM/Bank Gakin di Jember dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu cara pemberdayaan penduduk miskin di kabupaten Jember?". Mengingat jumlah LKMM yang telah ada di dusun-dusun baru 41, sedangkan jumlah dusun di kabupaten Jember pada tahun 2008 adalah 985⁴. Jadi jumlah LKMM yang ada baru sekitar 5 persen dari jumlah dusun yang seharusnya perlu dilayani. Apabila kebijakan program pendirian LKMM yang telah terbentuk dapat dipertanggungjawabkan, maka ada harapan baik

bagi Pemkab Jember maupun pihak-pihak donor untuk ikut berpartisipasi memperbanyak jumlah LKMM dari yang sudah ada.

KAJIAN TEORI

Konsep kredit mikro, Lembaga Kredit Mikro (LKM) dan kebijakan kredit mikro di Indonesia

Kredit Mikro adalah alat atau wadah untuk memberdayakan potensi rakyat yang berbasis pada kemampuan ekonomi rakyat dengan pendekatan kebersamaan sebagai bagian integral dalam memperkuat perekonomian nasional⁵. Adapun Kredit Mikro yang merupakan terjemahan dari istilah "*micro finance*" dalam buku *Microfinance Handbook* yang ditulis oleh Ledgerwood didefinisikan sebagai lembaga penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro (UKM) serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan⁶.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut *Asian Development Bank* (ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha mikro

³ Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Jember, 2009).

⁴ Jember Dalam Angka, 2008

⁵ Mashudi, 2006:4

⁶ Hadinoto, 2005: xxiii

(*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*)⁷.

Secara umum lembaga yang menyalurkan kredit mikro di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis.

a. Formal terdiri:

1) Bank : BKD (Badan Kredit Desa); BPR Bank Perkreditan Rakyat); BKK (Bank Kredit Kecamatan), BRI Unit; Mandiri Unit Mikro; Danamon Simpan Pinjam; Unit Layanan Mikro BNI.

2) Non Bank : LDKP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan); KSP (Koperasi Simpan Pinjam); KUD (Koperasi Unit Desa); Pegadaian.

b. Non-Formal terdiri : LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat); KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat); BMT(Baitul Maal Wa Tamwil); LEPMM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri); UEDSP (Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam) dll⁸.

Adapun yang dimaksudkan dengan pengusaha mikro menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 6 adalah pengusaha.

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Hoff dan Stiglitz dalam Arsyad (2008:48) adanya informasi yang tidak sempurna dalam pasar kredit untuk pengusaha kecil dan mikro menjadi ciri usaha di pedesaan. Pasar kredit pedesaan memiliki ciri-ciri yang mengakibatkan tingginya biaya transaksi yang harus dipikul, sehingga mengakibatkan lembaga-lembaga keuangan formal kurang berani beroperasi di dalamnya. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut.

a. Para peminjam masing-masing memiliki kemungkinan untuk gagal melunasi pinjaman pada tingkat yang berbeda-beda, dan karenanya akan memakan banyak biaya untuk menentukan besarnya resiko masing-masing peminjam. Hal ini dikenal sebagai masalah penyaringan (*sreening problem*).

b. Akan memakan banyak biaya untuk memastikan bahwa para peminjam melakukan hal-hal yang diperlukan agar dapat melunasi pinjaman mereka. Ini disebut sebagai masalah insentif (*insentives problem*).

c. Tidak mudahnya memaksa peminjam untuk melunasi pinjaman mereka. Hal ini dikenal sebagai masalah penegakan (*enforcement problem*).

Sementara Arsyad (2008:49) sendiri berpendapat bahwa terdapat adanya beberapa

⁷ Adi, 2008:31-32

⁸ Soetanto, 2005:5

faktor yang menghambat lembaga formal dalam mengalokasikan kredit dipedesaan, sebagai berikut.

- a. Kurangnya agunan dari peminjam karena keterbatasan peminjam
- b. Masalah kesalahan pemilihan
- c. Masalah *moral hazard*
- d. Masalah kurangnya instrumen untuk melakukan penyingkapan dan penegakan.

Konsep Kebijakan

Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan sering disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* di Indonesia. Menurut Dunn Macrae (Ace Suryadi & H.A.R Tilaar, 1993:41) “kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan yang terarah”. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

Suatu kebijakan diperlukan juga proses analisis kebijakan untuk mengetahui dimana kelebihan dan kekurangan dari suatu program untuk dicari solusi alternatif yang sesuai dengan tujuan kebijakan agar dalam pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar

dan dapat mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi untuk pelaksanaan kebijakan selanjutnya. Selain itu juga diperlukan prosedur dalam melakukan analisis kebijakan agar sesuai dengan tatacara dan kriteria dalam kebijakan.⁹.

Siklus Kebijakan

Proses kebijakan bermula dari identifikasi dari masalah-masalah kebijakan sehingga dijadikan suatu agenda untuk memilah mana yang merupakan konteks kebijakan yang paling penting untuk diformulasikan menjadi sebuah perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dengan harapan tercapai tujuan kebijakan melalui evaluasi kebijakan yang berlangsung.

Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang menentukan dari hasil akhir dari suatu pelaksanaan kebijakan, oleh karena itu dalam perumusan kebijakan harus ada tindak lanjut agar kebijakan yang dilaksanakan tidak berjalan sia-sia, tetapi dapat berjalan secara sistematis.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini akan digunakan pendekatan deskriptif. Artinya penelitian ini berusaha mengungkapkan secara obyektif dan sistematis. Proses penelitian ini dimulai dengan melalui tahap eksplorasi yang

⁹ Dunn Ace Suryadi & H.A.R Tilaar, 1993: 40-41

dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data sekaligus dilakukan klasifikasi dan analisa data di lapangan.

Pengumpulan Informasi tentang bagaimana kebijakan kelembagaan dibuat dan peran pemerintah didalamnya, serta bagaimana pengurus LKMM mempersepsi tugas-tugas yang dipercayakan pada mereka dari pemerintah daerah, bagaimana strategi-strategi yang mereka pilih dalam mengefektifkan kegiatan-kegiatan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat secara bertanggung jawab yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, studi dokumen.

HASIL PENELITIAN

Analisis deskripsi hasil penelitian Deskripsi program LKMM di Jember

Program Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM) di Kabupaten Jember masih sebatas pada hasil kebijakan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah kabupaten Jember karena selama ini belum ada program yang memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Kebijakan pembentukan LKMM di kabupaten jember tentunya program yang baik sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil meskipun belum ada pedoman yang mengatur dalam pelaksanaannya.

Hal ini mengundang Bupati untuk mengeluarkan keputusan pedoman pengelo-

laan LKMM dan Koperasi pedesaan Kabupaten Jember secara garus besar agar dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Pedoman ini tentunya perlu ada peraturan yang berkelanjutan untuk mengatur pengelolaan kepengurusan LKMM secara terperinci dan terstruktur.

Identifikasi kebijakan LKMM Kabupaten Jember

Kebijakan merupakan aturan yang dilaksanakan melalui serangkaian program. Kebijakan LKMM di jember merupakan ide dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kredit Menengah. Kebijakan ini berawal dari isu kebijakan yang mana di kabupaten jember belum ada program untuk pelaku ekonomi mikro. Hal ini yang memprakarsai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kredit Menengah untuk menerapkan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

Tujuan terbentuknya program ini juga untuk meningkatkan kerja sama antar kelompok masyarakat dan rumah tangga miskin dalam mengelola modal keuangan yang digulirkan proyek untuk mengurangi kemiskinan. Kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat karena kesejahteraannya dapat meningkat dengan terlibat dalam kepengurusan maupun keanggotaan program LKMM. Semua peraturan dan ciri-ciri LKMM yang ada diatur oleh Dinas Koperasi

Kabupaten karena yang menangani pelaksanaan ini petugas dari Dinas sehingga dapat berlangsung sesuai dengan Undang-undang maupun acuan yang berlaku.

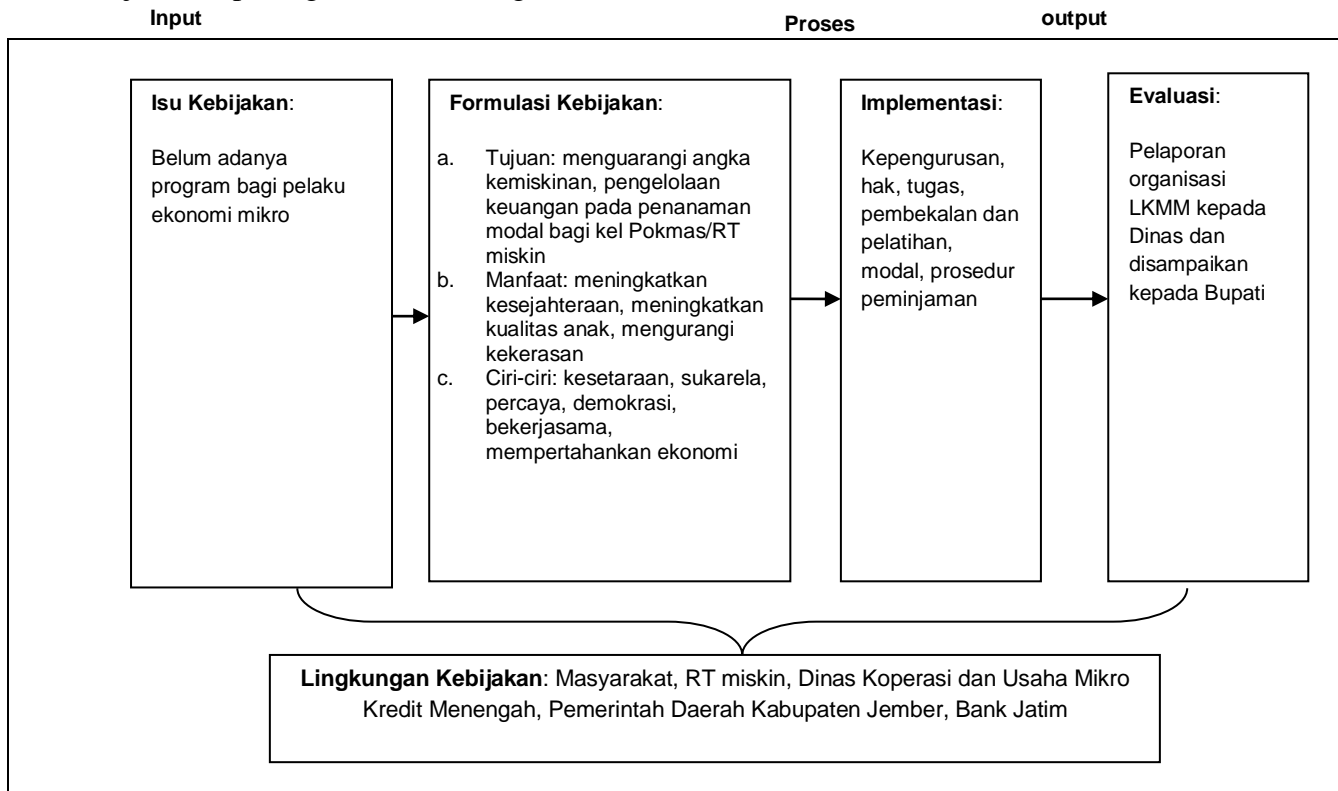
Kebijakan ini tidak serta merta dilakukan sesuai dengan kehendak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kredit Menengah, tetapi dalam pelaksanaan kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas lingkungan masyarakat yang ada. Semua penguatan pengurus LKMM, mulai dari pembentukan pengurus, tugas pengurus dan hak pengurus diatur oleh Pemerintah, petugas pendamping dari Dinas Koperasi tinggal melakukan pedoman yang telah ditetapkan. Pedoman itu wujud dari kebijakan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program kegiatan LKMM agar LKMM yang ada di kabupaten Jember selaras dan dapat berkesinambungan antar semua program LKMM se kabupaten Jember, paling tidak dalam prosedur kegiatan kerja. Pengurusan kegiatan LKMM tentunya melibatkan masyarakat, karena pada intinya kegiatan ini untuk masyarakat ekonomi kecil sehingga semua kelompok masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan ini. Selain itu ada program pendampingan dan pelatihan bagi pengurus LKMM karena masyarakat yang terlibat adalah masyarakat yang awam dan perlu bimbingan dan arahan dalam kegiatan ini. Kegiatan kepengurusan LKMM bersih dari politik karena sistem perekrutan berdasarkan survey dan berlangsung secara

rahasia untuk mengoptimalkan kegiatan program dan mengantisipasi adanya kegiatan KKN. Permodalan maupun sistem peminjaman semua diatur dalam pedoman pelaksanaan LKMM.

Dalam melakukan penguatan LKMM, Dinas Koperasi juga membentuk pokok masyarakat untuk memperlancar kegiatan dan membangun kerjasama antara masyarakat sebagai pengurus, rumah tangga miskin serta pihak Dinas maupun lembaga lain yang terlibat dalam pelaksanaan program. Proses kebijakan yang terakhir adalah proses evaluasi dari kebijakan, tetapi dalam penelitian ini belum pada tahap implementasi seluruh program LKMM, tetapi hanya pada evaluasi pelaksanaan program secara rutin. Evaluasi dalam kegiatan ini meliputi serangkaian laporan perkembangan LKMM, termasuk didalamnya pembukuan, utang piutang, aktiva, hutang dan perkembangan modal serta laporan laba rugi.

Laporan ini dibuat oleh pengurus LKMM untuk disampaikan kepada Bupati Jember yang sebelumnya disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kredit Menengah melalui pihak pendamping. Evaluasi ini sangat bermanfaat bagi perkembangan LKMM karena dapat dianalisis kekurangan maupun hambatan yang terjadi pada LKMM di tiap daerah sehingga pihak Dinas juga dapat melakukan strategi kebijakan pada pelaksanaan kegiatan

selanjutnya. Dalam proses implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa program LKMM di jember merupakan program dibawah pengendalian dinas koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan upaya menanggulangi kemiskinan dengan sasaran kelompok masyarakat rumah tangga miskin yang menekankan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Kepengurusan LKMM dilakukan oleh Dinas Koperasi yang dilakukan secara rahasia dan tanpa kampanye dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa pembeda. Pelatihan dan pembinaan kepengurusan LKMM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

memahami dan merumuskan criteria dan karakteristik dalam berorganisasi sehingga dalam menerapkan program di LKMM dapat sesuai dengan harapan.

Pengembangan LKMM merupakan tugas dan tanggungjawab para pengurus dan anggotanya, tentunya Dinas Koperasi juga berperan dalam pengembangan ini yaitu berkaitan dalam hal monitoring/evaluasi program serta alokasi modal. Modal LKMM di Kabupaten jember berasal dari APBD yang dialokasikan melalui program penyediaan modal (investasi) dengan Bank Jatim. Adapun bentuk pengembangan usaha modal LKMM dilakukan dengan membangun pokmas dimana hal ini dapat meningkatkan peran dan fungsi LKMM yang

lebih baik dan berkembang dalam mensejahterakan masyarakat miskin.

Saran

Program LKMM di Kabupaten Jember perlu diperluas lagi untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak luar masyarakat penyelenggara LKMM karena dengan banyak bekerjasama tentunya akan meningkatkan produktivitas LKMM untuk semakin berkembang misalnya dengan pengusaha pertokoan yang besar untuk memberikan modal tambahan ataupun bekerjasama dalam menjual produk dengan metode bagi hasil.

Kegiatan monitoring dari Dinas Koperasi hendaknya dilakukan secara berkala dan rutin setiap minggunya untuk mengantisipasi manajemen LKMM yang kurang sehat sehingga dapat diantisipasi resiko yang akan terjadi. Evaluasi juga perlu dilakukan dalam kepengurusan dan peminjaman agar tidak terjadi perselisihan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga dapat meminimalisir hambatan yang mungkin akan terjadi. Evaluasi secara berkala pada semua aspek akan memperlancar kegiatan pengembangan LKMM di Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Anonim. 2003. *Peninjauan Secara Menyeluruh Terhadap Pungutan Sektor Usaha Kehutanan*. Bogor: Penelitian APhi dan Fak. Kehutanan IPB.

Adams, Dale W & Delbert A. Fitchett, ed. 1992. *Infomal Finance In Low Income Countries*. Boulder; Mestview Press.

Adi, Kwartono. 2007. *Analisa Usaha Kecil Dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Arsyad, Lincoln. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro; Institusi, kinerja dan Sustainability*. Yogyakarta: Andi Offset.

Christen, Robert B.dkk.. 1995. *Maximizing the Outreach of Microenterprise Finance; The Emerging Lessons Succesful Programs*. Focus Note. No.2, Washington DC.

Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Daymon, Christine & Immy Holloway. 2002. *Metode-Metode Riset Kualitatif*. Yogyakarta: Bentang.

Hadinoto, Soetanto. 2005. *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*. Yogyakarta: Andi Offset.

Huraerah, Abu. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*. 2008. Bandung: Humaniora.

Imelia. 2009. *Peranan Lembaga Keuangan Formal Dan Informal, Dalam Aspek Permodalan Usaha Kecil*. Jambi: Jurnal Manajemen Dan Pem-bangunan, vol. VIII. Univ. Negeri Jambi.

Ismawan, Bambang. 2005. *Mapping Micrifinance In Indonesia*. Jakarta: Jurnal Ekonomi Rakyat. Edisi Maret.

Israel, Araturo. 1990. *Pengembangan Kelembagaan, Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*. Jakarta: LP3ES.

Nowak, Maria. 2008. *Revolusi Kredit Mikro, Dimana Pinjaman Bukan Hanya Untuk Yang Kaya*. Jakarta: Dian Rakyat.

Nurmanaf, A.Rozany. 2008. *Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat Dengan Petani*. Bandung: Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian. volume 5. no. 2.

Oliver, Christen. 1997. *Sustainable Competitive Advanted*. UK: Strategic Management Journal. 18.

